

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI
KEPENGHULUAN SUNGAI SEGAJAH JAYA KECAMATAN KUBU KABUPATEN
ROKAN HILIR TAHUN 2015**

Oleh:

Nurmala

Dosen Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax (0761)63277

Abstract

The village is the Musrenbang planning forum (program) is implemented by public institutions, namely the village government, in cooperation with citizens and other stakeholders. Musrenbangdes in Kepenghuluan Segajah River Jaya still minimal and still passive, it is due to a lack of understanding on development planning, low levels of education, and lack of socialization and lack of public participation in the government apparatus Kepenghuluan.

The concept of the theory used in this research is sanders Communication by explaining that in analyzing the development of society, we can see the communication from the four perspectives, namely Process, Method, Program and social movements. This study aims to find out about the Development Planning Meeting (MUSRENBANG) in Kepenghuluan Segajah Jaya Sungai Kubu Rokan Hilir District of the Year 2015. This research uses qualitative research methods and assessment of descriptive data. In this collection of data collection using interview techniques, observation, and documentation. By using the informant as a source of information.

The results showed that the implementation of development planning Kepenghuluan Segajah Jaya Sungai not optimal and maximum efficiency and effective action has not been done so that the results are not based on the needs of the community, so there are still a lot of development needs of the community but is not included in the proposal development and planning'm absolutely not felt the benefits and impacts positively by the public. This study suggests that the government Kepenghuluan order to improve the quality nor the capacity of human resources in the implementation and administration Musrenbangdes Kepenghuluan should take decisions and policy development programs based on community needs and development of the most prioritized so that no misunderstanding to a predefined program.

Keywords: Consultation, planning, development.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Tentang Desa tersebut secara substantif menempatkan perencanaan pembangunan sebagai instrument yang sangat penting dalam sistem pengambilan keputusan yang berguna untuk mempercepat terwujudnya pembangunan yang baik. Untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Desa, di dalamnya diatur bagaimana tata cara Pemerintahan Desa, pengambilan keputusannya, serta menjaga berbagai dana yang diperuntukkan untuk Desa agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional menjelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat tingkat pusat dan daerah.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa (Musrenbangdes) Kecamatan (Musrenbangcam), Kabupaten/kota (Musrenbangda) hingga level nasional dilakukan melalui musyawarah. Musrenbang merupakan forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintahan Desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesalahpahaman tentang kepentingan dan kemajuan Desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar Desa. Musrenbang sendiri merupakan suatu bentuk

forum musyawarah atau perundingan antar para pemangku kepentingan dalam suatu Desa untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan. Kegiatan Musrenbang di Kepenghuluan dikoordinasikan oleh Camat dan dilaksanakan oleh Kepenghuluan.

Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2015 diarahkan untuk menjadi wadah bagi partisipasi masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan, sehingga hasil proses perencanaan yang dilakukan dapat lebih berpihak kepada mereka. Meskipun selama ini pelaksanaan Musrenbang diwarnai dengan suasana dialogis yang sangat kental akan tetapi kondisi tersebut belum bersahabat untuk mengakomodir bahkan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin maupun perempuan untuk menyampaikan pendapat, saran atau keinginan mereka untuk memperbaiki keterpurukan ekonomi yang mereka alami, Musrenbang masih menjadi dominan bagi para elit Kepenghuluan untuk menyampaikan proyek-proyek yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya.

Adapun program (output) dalam Musrenbangdes yaitu sebagai berikut:

1. Daftar prioritas kegiatan untuk penyusunan RKP-Des tahun anggaran berjalan
2. Daftar prioritas masalah daerah yang ada di Desa untuk disampaikan dan diproses lebih lanjut di Musrenbang Kecamatan
3. Daftar prioritas usulan kegiatan yang akan diprioritaskan di Kecamatan serta akan diajukan pendanaannya melalui PNPM-MP
4. Daftar nama tim delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan Minimal 5 orang dari Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya

Maka dari itu adapun kegunaan dan kepentingan Usulan Perencanaan Pembangunan yaitu untuk mengetahui dari segi-segi mana pembangunan yang dibutuhkan atau diprioritaskan dalam suatu lingkungan masyarakat disini juga agar timbulnya rasa kebersamaan antara pemerintah Kepenghuluan dengan masyarakat setempat dengan diadakan perencanaan pembangunan maka akan diminta partisipasi kepada masyarakat untuk dapat hadir dan memberikan pendapat apa saja yang menjadi prioritas dari pembangunan yang dibutuhkan.

Aparat pemerintahan Kepenghuluan beserta masyarakat Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya dalam menyelenggarakan serta melaksanakan perencanaan pembangunan kurang mampu untuk merumuskan, menemukan permasalahan pembangunan-pembangunan yang dibutuhkan di kepenghuluan tersebut. Dapat juga dilihat dengan jelas pembangunan infrastruktur di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya belum teralisasi dengan baik dan Penghulu Sungai Segajah Jaya belum mampu membina dan mengayomi masyarakatnya dalam kegiatan-kegiatan sosial, budaya ataupun terlibat dalam kegiatan masyarakat setempat yang seharusnya sesuai dengan hasil Musrenbang yang telah disepakati bersama. Dapat dilihat dari gejala-gejala di atas bahwa masih lemahnya kemampuan aparat pemerintahan Kepenghuluan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kepenghuluan. Untuk itu penulis beranggapan bahwa masih ada kekurangan-kekurangan baik itu kemaksimalan, keefektifan, serta keefesienannya, dalam memperoleh hasil perencanaan yang baik. Dari fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya dengan judul: **“Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya**

Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015”

B. Rumusan masalah

Ada pun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015?
2. Apa Faktor-faktor yang Menghambat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang Menghambat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Desa khususnya untuk pelaksanaan dan pengelolaan Musrenbang Desa untuk kemajuan pembangunann Desa dan kesejahteraan masyarakat. Memberikan informasi kepada pelaku pembangunan tentang pentingnya partisipasi mereka dalam pelaksanaan Musrenbang untuk menentukan prioritas pembangunan.

b. Manfaat praktis

1. Sebagai bahan informasi untuk memahami apa saja factor-faktor

yang menghambat Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya

2. Sebagai bahan informasi untuk peneliti lainnya yang akan meneliti tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

E. KONSEP TEORI

1. Partisipasi Masyarakat

Menurut **Juliantara** (2004:84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun intermediasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.

Menurut **Dwipiyana** (2003:81) mengemukakan bahwa partisipasi menyangkut dua dimensi, yakni keluar dan dalam. Yang pertama, menyangkut partisipasi yang melibatkan pemerintahan itu sendiri dan kedua, menyangkut partisipasi warga Desa terhadap jalannya pemerintahan. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya, yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat tersebut secara maksimal.

Menurut **Wibisana** (1989:41) partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung mau pun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program. Partisipasi secara langsung berarti masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan.

2. Perencanaan

Dalam menjelaskan permasalahan yang diuraikan diatas, maka teori sebagai acuan yang sangat diperlukan dalam mengemukakan penjelasan permasalahan yang dikaji agar relevan dan terarah. Menurut sebagian besar para ahli berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. dikemukakan oleh **conyers** (dalam **arsyad** 1999:19) .

Menurut **Drama Setyawan Salam** (2002:14) perencanaan merupakan suatu tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi:

- a. Strategi
- b. Kebijakan
- c. Program
- d. Proyek
- e. Presedur

Menurut **Widjojo Nitisastro** (dalam **arsyad 1999:21**) perencanaan adalah pada dasarnya berkisar pada dua hal, pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. yang kedua ialah pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

3. Pembangunan

Menurut **effendi** (2002:2) mendefinisikan “pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan”. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan dapat berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka

wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

Sedangkan Menurut **galtung** (dalam **Trijono,2007:3**) pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam

Menurut **Todoro (2011:46)** pembangunan harus dilihat dari sebagai suatu proses yang multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan mendasar didalam struktur sosial, perilaku masyarakat, perbaikan institusi-institusi yang seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan ketidak merataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan

4. Komunikasi

Menurut **Harun (2012:162)** komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan. Terutama antara masyarakat dengan pemerintah. Sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk menuju pembangunan.

Pembangunan memerlukan komunikasi agar rakyat mempunyai kadar huruf serta pendapatan dan sosio-ekonomi yang rendah, haruslah diberitahu mengenai ide dan kemahiran yang belum mereka kenal, dan jangka waktu yang singkat. Mereka juga mesti diberi motivasi.

Menurut **Harun (2012:162)** komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan. Terutama antara masyarakat dengan pemerintah. Sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan.

Tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk menuju pembangunan.

Menurut **Laswell** dalam **Cangara (2005:18-19)** komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Sebuah definisi singkat dibuat oleh Haroald D. Laswell bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi adalah menjawab pertanyaan “siapa yang menyampaikan, Apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya”. Para digma laswell diatas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Yakni: komunikator atau pembicara, pesan yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima, saluran atau media yakni alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesan, penerima atau komunikan sering juga disebut sasaran/tujuan sebagai orang yang di operasionalkan, serta mencari tahu fakta-fakta keberhasilan atau kegagalan dari sebuah program.

Selanjutnya menurut **Sanders (1958)** dalam menganalisis pembangunan masyarakat, kita bisa melihat komunikasi dari segi perspektif, yaitu komunikasi sebagai *proses, metode, program, dan gerakan sosial*.

- a. Komunikasi sebagai Proses harus kita pelajari misalnya melalui prinsep dan teori perubahan sosial, kebudayaan implisit dan eksplisit, dinamika hubungan kekuasaan atau hubungan silang budaya, termasuk kooperasi-akomodasi-persaingan-konflik, teori sosialisasi dan enkulturasi (permasayakatan dan pemberdayaan) .
- b. Komunikasi sebagai Metode harus kita dalami antara lain melalui teori kontrol sosial, teori pengembangan masyarakat, teori belajar, teori

formasi dan perubahan sikap, kecenderungan perilaku, motivasi dan kongnisi, termasuk teori selektivitas dan perbedaan individu.

- c. Komunikasi sebagai Program perlu kita pelajari melalui memanfaatkan dan memperkembangkan teori manajemen analisi sytem teori dan teknik evaluasi dan pengukuran untuk mengetahui hasil (output) pengaruh (effect) dampak (impact).
- d. Komunikasi sebagai gerakan sosial antara lain kita bisa minta tolong dengan teori teori sosiologi politik psikologi sosial khususnya teori pskilogi massa termasuk pendapat problema dan aksi sosial teori manfaat dan kepuasan sosial.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Lokasi ini di pilih oleh penulis yang sesuai dengan topik atau permasalahan yang menjadi penelitian. Dengan pertimbangan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan pembangunan di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2015

B. Informan penelitian

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberi keterangan. Informan adalah suatu istilah yang memberikan pengertian kepada seseorang atau subjek yang bertugas memberikan data dalam bentuk informasi yang diketahui. Dalam teknik penelitian Kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive* yaitu, teknik pengambilan sample data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu misalnya orang yang

dianggap yang paling tahu terhadap permasalahan yang diteliti, atau mungkin orang yang dianggap paling menguasai sehingga memudahkan penelitian menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Dalam hal ini yang menjadi Informan dalam peneliti ini adalah Penghulu, Kepala urusan pembangunan, lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh masyarakat.

Tabel. 1.1
Daftar Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Penghulu Sungai Segajah Jaya	1 orang
2.	Sekretaris Desa	1 orang
3..	Kepala Urusan Pembangunan	1 orang
4.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	1 orang
5.	Badan permusyawaratan Kepenghuluan (BPK)	1 orang
6.	Kepala Dusun	1 orang
7.	RT/RW	1 orang
8.	Tokoh Masyarakat	3 orang
Jumlah		10

Sumber: Data Olahan Tahun 2015.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber berupa informasi dari hasil proses wawancara dan informasi penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian serta didukung dengan data observasi yang dilakukan penulis seperti:

1. Hasil wawancara secara lagsung dengan informan.
2. Data dan fakta yang ada dilapangan yang diperlukan secara hasil wawancara proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya dan Faktor-Faktor yang menghambat

tidak suksesnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sungai Segajah Jaya.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berkenaan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui pemanfaatan sumber data yang tersedia seperti buku-buku, catatan arsip, dokumen-dokumen segala bentuk informasi yang bersifat menunjang penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara/interview

Yaitu kegiatan melakukan tanya jawab atau interview secara langsung kepada informan untuk interview secara langsung kepada informan untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. Observasi

Penelitian mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, mengenai Perencanaan Pembangunan di Desa Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

E. Analisa Data

Analisa yang digunakan adalah analisa yang bersifat penalaran mengenai fenomena-fenomena yang akan diteliti, setelah data di kumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara kemudian penulis menganalisa data secara deskriptif. Analisa dalam penelitian ini digunakan prinsip analisa kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada prosedur riset yang menghasilkan kualitatif, yaitu di uraikan dalam bentuk kalimat kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015

Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang di selenggarakan oleh lembaga publik sesuai tingkatnya, yaitu pemerintahan Desa, Kecamatan, pemerintahan Kabupaten/kota, Bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Penyelenggaraan Musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diatur oleh undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintahan, masyarakat, dan swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. Di dalam Musrenbang ketiga komponen tersebut dapat memberikan informasi berkenaan dengan pembangunan yang memang dibutuhkan dan yang diprioritaskan.

1. Proses dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

a. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes (TPM)

Pembentukan tim penyelenggara Musrenbangdes merupakan kegiatan Pra-Musrenbangdes yang bertujuan untuk mempersiapkan tim penyelenggara Musrenbangdes dan segala sesuatu yang diperlukan pada saat Musrenbangdes baik itu persiapan teknis maupun persiapan

logistik. Proses pembentukan tim penyelenggaraan Musrenbangdes yaitu dimulai dari aparat pemerintahan Kepenghuluan yang menetapkan baik itu lembaga-lembaga pemerintah Kepenghuluan beserta aparat pemerintahan Kepenghuluan yang dianggap memiliki pengetahuan dan mampu untuk menyelenggarakan Musrenbangdes dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada setelah itu tim penyelenggara Musrenbangdes terpilih, seterusnya TPM menetapkan siapa yang menjadi tim pemandu yang terdiri dari 2-3 orang seterusnya penentuan persiapan teknis dan persiapan logistik.

b. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang apa yang diselenggarakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting karena akan menentukan minat atau keterkaitan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan atau terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan. Dalam hal ini pemerintah Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya dalam melakukan sosialisasi cukup terbilang sangat kurang dilakukan yaitu sosialisasi hanya dilakukan satu kali kepada masyarakat dimulai melalui perwakilan aparat pemerintahan Kepenghuluan yaitu dengan cara mendatangkan tiap-tiap Kepala Dusun dan seterusnya Kepala Dusun menyampaikan kepada RT dan RW dan begitu seterusnya. Artinya sosialisasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbangdes terbilang sangat kurang apa lagi ditambah tidak menggunakan media apapun dan tidak menggunakan surat undangan melainkan disampaikan langsung dari orang ke orang maka dari itu ada informasi tersebut yang tidak

mengetahuinya atau tidak tersebar secara merata.

c. Musyawarah perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbangdus)

Musrenbangdus adalah kegiatan yang dilakukan ditingkat dusun guna mengetahui apa yang menjadi persoalan kebutuhan pembangunan ditingkat dusun dengan membuka kesempatan bagi tiap-tiap RT dan RW dan juga masyarakat untuk menyampaikan persoalan atau aspirasi masyarakat yang ada tiap-tiap RT dan RW dan juga masyarakat untuk menyampaikan persoalan atau aspirasi masyarakat yang ada di tiap-tiap RT dan RW. Di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya itu sendiri dalam pelaksanaan Musrenbangdus berdasarkan perintah dari aparat pemerintahan Kepenghuluan yang disampaikan secara langsung kepada kepala dusun untuk dapat melakukan Musrenbangdus terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Musrenbangdes ditingkat Kepenghuluan seterusnya Kepala Dusun menyampaikan kepada tiap-tiap RT dan RW bahwa akan dilaksanakannya Musrenbangdus dengan tujuan menampung segala aspirasi masyarakat mengenai masalah pembangunan yang ada di dusun dengan begitu nantinya akan mudah pada pelaksanaan Musrenbangdes.

d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah suatu bagian kegiatan formal yang dilakukan ditingkat pemerintahan Desa yang sama didalamnya terdapat Musyawarah mengenai perencanaan Desa untuk menentukan dan persoalan-persoalan pembangunan atau untuk menampung kebutuhan-kebutuhan pembangunan dari masyarakat Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa, organisasi-organisasi

Desa, Tokoh masyarakat dan anggota masyarakat.

a. Metode dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Metode dalam pelaksanaan Musrenbangdes biasanya pemerintahan Kepenghuluan melibatkan atau mengundang pihak dari Kecamatan untuk dapat menghadiri acara Musrenbangdes di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya tersebut, akan tetapi di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya berbeda dalam pelaksanaan Musrenbangdes tidak melibatkan pihak perwakilan dari Kecamatan.

Adapun yang menyampaikan Metode dalam pelaksanaan Musrenbangdes yaitu Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya yang dibantu oleh bagian aparat pemerintahan Kepenghuluan dan selanjutnya disampaikan kepada masyarakat yang mengikuti pelaksanaan Musrenbangdes, dengan tujuan agar pelaksanaan Musrenbangdes berjalan dengan baik. Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya menyampaikan metode Musrenbang melalui media komunikasi secara langsung agar bisa dipahami dengan baik. Adapun dampak yang terlihat dalam metode pelaksanaan Musrenbangdes ini yaitu Musrenbang cenderung tidak efektif, hasil yang didapat dari Musrenbangdes pun akhirnya menjadi hasil yang diinginkan oleh pihak pemerintahan yang kadangkala bukanlah hal-hal substantif seperti yang dibutuhkan masyarakat. Untuk mengurangi itu semua, sehingga nantinya diharapkan tercipta Musrenbang yang efektif dan hasilnya berpihak kepada masyarakat.

b. Program dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Program berarti memiliki keterkaitan, dalam hal ini, setiap unsur perencanaan yang ada dalam

Musrenbangdes Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya saling berhubungan antara satu unsur ke unsur yang lain, sehingga pembangunan yang diharapkan dapat direalisasikan dan mencapai tujuan dari Kecamatan. Adapun yang menyampaikan program dalam pelaksanaan Musrenbangdes ini adalah Kepala Urusan Pembangunan, dia lebih mengetahui bagaimana dan apa saja program yang perlu diusulkan dalam perencanaan pembangunan Desa atau Musrenbangdes. Program ini disampaikan kepada masyarakat melalui media komunikasi secara langsung ketika pelaksanaan Musrenbangdes dilakukan.

c. Gerakan Sosial dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Gerakan sosial adalah perilaku kolektif yang ditandai kepentingan bersama dengan tujuan jangka panjang, yaitu untuk mengubah ataupun mempertahankan masyarakat atau instiusi yang ada didalamnya. Secara teori konsep gerakan sosial lebih banyak dikembangkan dalam konteks gerakan perlawanan yang bersifat politik, tapi substansinya sebenarnya gerakan sosial bisa dilakukan juga dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan, pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental. Adapun yang menyampaikan kepada masyarakat tentang gerakan sosial ataupun disebut dengan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan Musrenbangdes adalah bagian dari aparat pemerintahan Kepenghuluan yang diutuskan memberikan informasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan Musrenbangdes yang mana kehadiran masyarakat sangatlah penting

dalam Musrenbang. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes sangatlah minim dan pasif, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai perencanaan pembangunan, tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya sosialisasi dalam Musyawarah tingkat RT/RW.

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Tahun 2015

1. Lemahnya Kapasitas Lembaga-Lembaga yang menangani Musrenbangdes

Kapasitas adalah sebagai kemampuan individu, organisasi (unit organisasi) atau system untuk menunjukkan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, artinya kapasitas pemerintahan Kepenghuluan meliputi kemampuan aparatur Desa (individu), kelembagaan Desa (organisasi) seperti Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dll. Kemampuan yang baik sangat dibutuhkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan Kepenghuluan dengan tujuan agar dapat menyelenggarakan pemerintahan Kepenghuluan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan seperti dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan sangatlah diperlukan kemampuan dari aparat pemerintah Kepenghuluan beserta lembaga-lembaga pemerintahan Kepenghuluan guna menghasilkan perencanaan yang optimal, efektif, efisien dengan hasil yang maksimal dan perencanaan yang berkualitas.

Rendahnya sumber daya tenaga perencanaan ditingkat Kepenghuluan menjadi salah satu factor yang berpengaruh dalam proses penyusunan rencana pembangunan jika tidak didukung dengan

tenaga perencanaan ataupun keterlibatan maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik, dapat dilihat dari tabel 3.1 daftar hadir peserta Musrenbangdes, lihat tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Daftar Hadir Peserta Musrenbangdes Sungai Segajah Jaya Tahun 2015

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Penghulu	1
2.	Sekretaris	1
3.	Bendahara	1
4.	Ketua BPK	1
5.	Ketua LPM	1
6.	Kaur Pembangunan	1
7.	Kaur Umum	1
8.	Kepala Dusun	1
9.	RW	2
10.	RT	4
11.	Tokoh Masyarakat	6
Jumlah		20

Sumber : Buku Berita Acara Musrenbangdes Sungai Segajah Jaya Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa masih sedikitnya tenaga perencanaan untuk dapat melibatkan diri dalam Musrenbangdes yaitu terhitung sebanyak 20 orang yang hadir.

a. Kelemahan Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang telah dikehendaki atau faaktor-faktor yang menghambat tercapainya keadaan yang tidak dikehendaki, identifikasi masalah dapat dilihat sebagai berikut Tidak ada tindakan lanjut yang nyata dari hasil Musrenbangdes selama bertahun-tahun, sehingga menyebabkan masyarakat jenuh untuk mengikuti dan menyalurkan aspirasi mereka melalui kegiatan Musrenbang Kurangnya sosialisasi secara terbuka oleh aparat pemerintahan Kepenghuluan Sungai Segajah

Jaya kepada masyarakat tentang pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap aparat pemerintahan Kepenghuluan.

b. Dukungan Data dan Informasi Pemerintahan Yang Lemah

Data dan informasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena disetiap informasi harus didukung dengan sebuah data agar informasi tersebut dapat dikatakan fakta maka sebuah data sangat diperlukan dan data merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya suatu data maka belum dapat sesuatu itu dikatakan fakta yang ada dilapangan. Data dan informasi diperlukan guna untuk mengetahui dan lebih memudahkan dalam pelaksanaan Musrenbangdes dengan data dan informasi maka akan diketahui apa saja yang sangat diperlukan baik itu data tentang Musrenbangdes maupun yang lainnya.

2. Lemahnya Sumber Daya Tenaga Perencanaan di Tingkat Kepenghuluan

Sumber daya tenaga dapat dilihat dari bentuk keterlibatan maupun partisipasi dari aparat pemerintah Kepenghuluan, lembaga-lembaga pemerintahan Kepenghuluan serta masyarakat untuk menghadiri maupun ikut terlibat dalam forum Musrenbangdes, dengan meluangkan dan memberikan tenaga, waktu, kesempatan sehingga mau meninggalkan aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari untuk menghadiri pelaksanaan Musrenbangdes, karena sumber daya tenaga dari mereka sangat diperlukan yaitu keterlibatan dalam forum Musrenbangdes dengan ikut berpartisipasi dan juga mampu untuk mengeluarkan argumen-argumen serta pendapat dengan satu tujuan dengan menunjukan suatu kekompakan maka barangkali usulan program pembangunan akan diterima dan mudah untuk masuk

dalam usulan begitupun sebaliknya jika partisipasi rendah dan tidak mampu merespon serta mengeluarkan argumen maupun pendapat maka adapun usulan program yang ingin dirumuskan barangkali sulit untuk diterima.

a. Terbatasnya waktu

Waktu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses penyusunan pembangunan perencanaan karena waktu sangat diperlukan untuk mengukur keefektifan perencanaan, dengan waktu yang cukup kita bisa melakukan dan membahas perencanaan pembangunan dengan baik, keterbatasan waktu bisa menjdai salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan di Kepenghuluan karena dengan waktu yang sedikit dan terbatas maka sulit untuk membahas dan merumuskan serta menyetujui program yang diusulkan, dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya dilihat dari segi waktunya sangat terbatas.

b. Perencanaan yang tidak terintegrasi

Pembangunan berorientasi kepada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat setempat, berbagai bentuk berpartisipasi masyarakat didalam perencanaan program pembangunan dapat dibentuk atau diciptakan. Hal ini sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat baik kondisi sosial, budaya, ekonomi, maupun tingkat pendidikannya, perencanaan yang terintegrasi ataupun perencanaan yang terpadu memilih beberapa indikator adanya suatu tujuan bersama, adanya keterkaitan unsur sasaran dalam pencapaian tujuan bersama, adanya satu kesatuan wilayah, keterkaitan antar input sumber daya, keterkaitan antar output kegiatan, penerapan pendekatan system

berkelanjutan, pengelolaan masing-masing unsur secara efisien dan efektif.

c. Pengalokasian Proyek Tidak Efektif dan Tidak Berdasarkan Skala Prioritas

Pembangunan yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan, tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan kegiatan, bukan hasil “*trial and error*” tetapi akibat dari perencanaan yang baik karena itu perlu untuk selalu diingat bahwa kegiatan perencanaan pembangunan yang efektif harus melalui perencanaan program/kegiatan yang baik, dengan kata lain pembangunan yang baik harus direncanakan sebaik-baiknya, sebagaimana pengertian perencanaan itu sendiri diantara sebagai proses pemilihan dan menghubungkan fakta serta menggunakannya untuk asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi dimasa mendatang, kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan (Terry, 1960) dengan demikian, dapat disimpulkan bawa perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya serta faktor-faktor yang menghambat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran bagi pihak yang berkepentingan dan terkait:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya terdiri dari kegiatan pembentukan

proses, metode, program dan gerakan sosial dengan tujuan untuk menampung dan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang ada di setiap dusun, Musrenbangdes dilakukan untuk menyaring aspirasi dan menyusun arah kebijakan, Musrenbang di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya dikatakan belum optimal dan belum melakukan perencanaan yang baik karena dapat dilihat dari lemahnya kemampuan aparat pemerintahan Kepenghuluan, masyarakat dalam melaksanakan Musrenbangdes masih ada kekurangan-kekurangan, baik itu dilihat secara teknis pelaksanaannya dan kinerjanya juga belum optimal, belum mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Kecamatan maupun tahapan Musrenbangdes sehingga hasil yang diperoleh belum efektif, efisien, belum maksimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Faktor-faktor yang menghambat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya yaitu terbagi dua factor, pertama lemahnya kapasitas pemerintahan Kepenghuluan dalam membuat perencanaan pembangunan, Kepenghuluan yang terdiri dari lemahnya kapasitas dan lembaga-lembaga yang menangani Musrenbangdes, kelemahan identifikasi masalah, dan lemahnya dukungan data dan informasi pemerintahan, yang kedua faktor yang berpengaruh dalam proses penyusunan rencana pembangunan Kepenghuluan antara lain, lemahnya sumber daya tenaga perencanaan, terbatasnya waktu, perencanaan pembangunan yang tidak terintegrasi dan pengalokasian proyek tidak efektif dan tidak berdasarkan skala prioritas.

SARAN

Dalam penelitian ini peneliti memberi saran bahwa pemerintahan Kepenghuluan agar dapat meningkatkan kualitas ataupun kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Musrenbangdes, diharapkan aparat pemerintahan Kepenghuluan harus benar-benar menggerakkan pelaksanaan Musrenbangdes dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu tentang pentingnya Musrenbangdes dan juga untuk hasil yang maksimal. Pemerintahan Kepenghuluan perlu melakukan persiapan yang baik sebelum Musrenbangdes, supaya segala sesuatu terpenuhi.

Pemerintahan Kepenghuluan harus mengambil keputusan maupun kebijakan program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang paling diprioritaskan supaya tidak ada kesalah pahaman untuk program yang sudah ditetapkan, begitu juga dianjurkan kepada aparat pemerintahan Kepenghuluan agar memberikan hadiah atau imbalan kepada anggota masyarakat bagi yang mengikuti Musrenbangdes dengan begitu maka masyarakat akan lebih tertarik untuk mengikuti Musrenbangdes.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2008. *Pembangunan Pendesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Conyers Diana. 1991. *Perencanaan Sosial Di Dunia ketiga: Suatu Pengantar*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Eko Sutoro. DKK. 2014. *Desa Membangun Indonesia. Forum Pengembangan pembaharuan desa (FPPD)*. Yogyakarta.
- Haris Hardiansyah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Mashur Dadang . 2016. *Administrasi Pembangunan*. Alaf Riau. Pekanbaru
- Nugroho Riant. 2003. *Reinventing pembangunan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Raharjo Adisasmita. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Robinson Tarigan. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Usman Sunyanto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sanders. I. T (1958) *Theories Of Community Develpment*. Rural Sociology 23 (1) : 1-12
- Sinulingga, D. Budi . 1999. *Pembangunan Kota, Tinjauan Regional dan Lokal*. Sinar harapan. Jakarta
- Susonto, S. Astrid. 1985. *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Kencana*. Jakarta.
- Yustika, Ahmad Erni. 2002. *Pembangunan dan Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia*. Grasindo. Jakarta.
- Nitisastro Widjojo. 2010. *Pengalaman Pembangunan Indonesia*. Buku Kompas. Jakarta.

Skripsi

- Akbar Hidayat. 2011. *Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus: Kecamatan Langgam Tahun 2012-2013)*.

Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
Houdson Marganda Napitupulu. 2011. Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2013. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sumber lain:

Kantor Camat Kubu
Kantor Penghulu Sungai Segajah Jaya.